



LAMPUNG SAI

OKTOBER 2021

EDISI 10





5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



SekapurSirih

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara.

Tanpa terasa, sudah 76 tahun Bhakti Kementerian Hukum dan HAM pada Bangsa Indonesia tercinta ini. Semangat Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) masih terasa mewarnai kegiatan Kanwil Kemenkumham Lampung di bulan ini. Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah Lampung melaksanakan donor darah dengan total 138 orang pendonor. Kantor Wilayah juga secara langsung mengirimkan New Normal Kit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek sebagai salah satu Rumah Sakit yang menangani pasien yang terpa-par Covid-19.

Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM RI yang menegaskan, bahwa Kemenkumham harus menjadi pioneer dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi serta cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kanwil kemenkumham Lampung juga akan terus memperbaiki kinerja dan birokrasi untuk memberikan layanan yang semakin baik pada masyarakat khususnya di wilayah Lampung.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!



IWAN SANTOSO

Pit. KAKANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG





Dari Redaksi

PELINDUNG

Plt. Kepala Kantor Wilayah
IWAN SANTOSO

PENGARAH

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
IS EDY EKOPUTRANTO

Kepala Divisi Pemasarakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRIANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-10 ini dengan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Pada edisi E-Buletin yang ke-10 ini, kami telah merangkum kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Dalam edisi kali ini, kami menyajikan liputan khusus mengenai Reses Taufik Basari ke Kanwil Kemenkumham Lampung yang membahas mengenai Overcrowding lapas hingga layanan OBH. Adapun Topik Utama pada edisi ini adalah Semarak Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2021 yang diwujudkan dalam serangkaian kegiatan bentuk pengabdian Kemenkumham Kepada Negeri. Selain itu, masih banyak liputan-liputan menarik lainnya yang kami rangkum dalam E-Buletin Lampung Sai edisi ke-10 ini.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar E-Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.





Daftar Isi

18
|
26



TOPIK UTAMA

Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2021

40



LIPUTAN KHUSUS

Reses ke Kanwil Lampung, Taufik Basari Bahas Overcrowding Lapas Hingga Layanan OBH

08



Penguatan dan Pengambilan Sumpah Pengurus Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM)

9



Kanwil Lampung Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lapas dan Kanim Kalianda

10



Plt. Kakanwil Jadi Narasumber Dalam Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa

12



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris Pengganti Kota Bandar Lampung

13



Menuju Pembangunan ZI WBK, Divisi Keimigrasian dan Kanim Bandar Lampung Study Tiru Pada Kanim Bogor

14



Menkumham Yasonna: Mari Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

16



Rangkaian HDKD Tahun 2021, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Kemenkumham

18



Semarak HDKD 2021, Jajaran Kanwil Lampung Ikuti Seminar Nasional Oleh Wakil Presiden



20

Pembukaan Skill & Challenge Menkumham Cup Peringatan HDKD 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI



21

Plt. Kakanwil Pimpin Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bandar Lampung



23

"Kumham Peduli, Kumham Puncak Peringatan HDKD, Kanwil Berbagi", Kanwil Lampung Gelar Lampung Ikuti Upacara Secara Donor Darah dan Sambangi RSUD Abdul Moeloek Berikan New Normal Kit



25



28

Jelang Desk Evaluasi TPN, Kanwil Lampung Lakukan Rapat Tim Pokja Pembangunan ZI Menuju WBK



30

Kanwil Lampung Berikan Internalisasi dan Penguatan Kepada PPNPN Terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM



31

Pemusnahan Arsip Fisik Fasilitatif dan Substantif di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung



33

DJKI Gandeng Kanwil Lampung Gelar Konsultasi Teknis Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021



35

Dialog Interaktif Pencegahan Pelanggaran KI, Kanwil Lampung Gandeng Korwas PPNS Polda



37

Kanwil Lampung Kunjungi Pemda Pesisir Barat dan Lampung Barat Terkait Harmonisasi Raperda dan Raperbup



39

"Back to Basics", Kadivpas Bina Mental, Disiplin, dan Integritas Petugas Pemasarakatan Lapas/Rutan



40

Reses ke Kanwil Lampung, Taufik Basari Bahas Overcrowding Lapas Hingga Layanan OBH



43

Yasonna Serahkan Sembilan Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri



44

Kunker Ke Rutan Sukadana dan Lapas Gusu, Plt. Kakanwil Saksikan Hibah Ambulance dari Bupati Lampung Timur



46

Kanwil Lampung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu 2021



Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Pengurus Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) Daerah Tahun 2021 Kanwil Kemenkumham Lampung

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Kegiatan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Pengurus Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) Daerah Tahun 2021 dilaksanakan. Selasa (05/10/2021)

Dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto dan Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Ma'mum kegiatan ini melantik dan mengambil sumpah kepada 3 (tiga) orang yaitu Samsul Komar selaku Ketua, Ratna Puspita Sari selaku Sekretaris, dan Syera Noviatama Sari selaku Bendahara Kemenkumham Lampung .

Acara yg di Hadiri Kepala Divisi Keimigrasian Lampung. Is Edy Eko Putranto, Kasubid Perizinan Keimigrasian Ma'mum dan pengurus Peradim Daerah Lampung, yg pengukuhan dan Pengambilan Sumpah pengurus perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) Daerah Tahun 2021 Ke-

menkumham Lampung.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring Melalui Virtual Zoom Meeting Bersama PERANIM pusat yg dihadiri oleh Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi, Zairoji beserta Pimpinan Tinggi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan khidmat.



Kanwil Lampung Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lapas dan Kanim Kalianda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Kegiatan Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda. Jum'at (01/10/2021)

Mendatangi Lapas Kalianda, Sebagai Perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko-putranto Bersama dengan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimmigrasian, Imam Santoso disambut oleh jajaran dari Lapas Kalianda.

Tim verifikasi langsung meninjau area di Lapas Kalianda yang dimana telah dibentuk inovasi pelayanan publik berbasis HAM. Hal ini juga sebagai bentuk Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan HAM khususnya di Lingkungan Lapas Kalianda.

Selanjutnya menuju ke Kantor Imigrasi Kalianda, Para tim verifikasi langsung meninjau area perubahan yang telah dilakukan, salah satunya tempat parkir khusus disabilitas serta area jalan khusus penyandang disabilitas. Peninjauan yang dilakukan ini merupakan bentuk penilaian apakah Unit Pelaksana Teknis telah memenuhi kriteria pemberi pelayanan publik berbasis HAM.



Plt. Kakanwil Jadi Narasumber Dalam Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa

Bertempat di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (06/10/2021) Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa dalam rangka Penataan Kewenangan Desa dan Pendapatan Asli Desa untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Pemerintah Desa mengenai proses penyusunan Produk Hukum Desa.



Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso dalam kegiatan ini berkesempatan menjadi narasumber dengan mengusung tema Kedudukan Peraturan Desa dalam Hirarki Hukum Tata Negara. Kegiatan ini dimoderatori oleh Suryani selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemateri Pertama, Zaidirina selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung membahas tentang tata Kelola Pemerintahan Desa ditengah Pandemi Covid-19 menerangkan bahwa setiap kegiatan dan regulasi yang berada di desa harus mengikuti dengan dasar peraturan maupun payung hukum agar kedepannya tidak menjadi tumpang tindih peraturan.

Selanjutnya Iwan Santoso menjelaskan tentang definisi dari Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Desa, Latar Belakang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Iwan menjelaskan bahwa Peraturan desa termasuk jenis peraturan perun-

dang-undangan dimana dapat dikategorikan harus memenuhi ketentuan, antara lain: dibuat secara tertulis dengan memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan disusun dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita bicara aspek hukum, kita harus jelas dan mempunyai dasar hukum yang pasti” tegas Iwan Santoso

Menarik kesimpulan, Iwan berucap “Peraturan desa berada setelah peraturan daerah/kabupaten/kota”.

Iwan menjelaskan bahwa Peraturan desa termasuk jenis peraturan perundang-undangan dimana dapat dikategorikan harus memenuhi ketentuan, antara lain: dibuat secara tertulis dengan memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan disusun dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita bicara aspek hukum, kita harus jelas dan mempunyai dasar hukum yang pasti” tegas Iwan Santoso

Menutup Kegiatan, Para peserta yang terdiri dari 50 Kepala Desa yang terpilih di Provinsi Lampung turut antusias dengan hadirnya beberapa pertanyaan yang langsung ditanggapi oleh para narasumber





Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris Pengganti Kota Bandar Lampung

Menindaklanjuti Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Nomor: 04/KET.CUTI-MPWN Prov Lpg/X/2021, Tentang Pemberian Izin Cuti Notaris dan Penunjukan Notaris Pengganti, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memberikan izin cuti kepada Notaris atas nama Chairul Anom selaku Notaris di Kota Bandar Lampung selama 8 (delapan) bulan terhitung tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Senin (11/10/2021)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan melakukan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris Pengganti kepada Saudari Irawati Kurniawan yang ditunjuk sebagai Notaris Pengganti selama menjalankan cuti. Dalam sambutannya, Nur Ichwan mengingatkan kepada notaris pengganti agar selalu bertanggung jawab dengan amanat yang diberikan serta tetap dapat menjaga nama baik notaris yang saudari gantikan.

"Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa saudari tetap harus bertanggung jawab atas segala produk hukum yang saudari buat selama menjadi Notaris Pengganti" tegas Nur Ichwan

“Saya ucapkan selamat menjalankan jabatan kepada notaris pengganti yang baru saja dilantik dan mengangkat sumpah, serta kita doakan agar notaris yang mengambil cuti dalam proses pengobatannya agar segera pulih” ujar Nur Ichwan



Menuju Pembangunan ZI WBK, Divisi Keimigrasian dan Kanim Bandar Lampung Study Tiru Pada Kanim Bogor

Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mendampingi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung melakukan Kunjungan Kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Kamis (07/10/2021)

Dalam rangka Study Tiru Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Ikut dalam kegiatan Pendampingan Study Tiru tersebut, Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Keimigrasian, Raden Ayu Fatimah, bersama dengan Kepala Sub Bidang Intelijen, Jojo Suparjo dan Kepala Sub Bidang Perizinan, Ma'mum.

Tiba di Kanim Kelas I Non TPI Bogor, Rombongan disambut Langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Surjono dan Jajarannya. Kabid Inteldakim, Raden Ayu Fatimah yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerianham Lampung, Iwan Santoso

dan Kepala Divisi Keimigrasian Lampung, Is Edy Eko Putranto, mengucapkan terima kasih atas perkenannya serta sambutan dalam rangka Study Tiru dalam mewujudkan dan meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Harapannya dengan adanya kegiatan ini pembangunan zona integritas di Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Lampung khususnya Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung bisa meraih Predikat WBK di tahun 2021.



Menkumham Yasonna: Mari Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan pentingnya kolaborasi nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Yasonna pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Yasonna menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan. Antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, sampai pada layanan keimigrasian.

"Tujuannya untuk menghadirkan layanan publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna, di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19," kata Yasonna.

Pada pekan lalu, kata Yasonna, Kemenkumham me-launching Aplikasi Perseroan Perseorangan

yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian nasional melalui UMKM dan usaha mikro. Aplikasi tersebut membuat UMKM dan usaha mikro dapat memiliki legalitas hukum dan melebarkan akses finansial melalui kerja sama perbankan.

Dalam seminar yang mengangkat tema "Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional" tersebut, Yasonna mengungkapkan bahwa Kemenkumham mengambil peran penting dan strategis dengan menjadi salah satu anggota tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNB-BI) untuk menstimulus UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Kementerian Hukum dan HAM juga mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui pembenahan regulasi, di antaranya UU Ke-pailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading accross border), dan penyederhanaan proses perizinan.

"Ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta menjadi dorongan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Covid-19," ujarnya.

Dukungan terhadap perkembangan UMKM juga dilakukan Kemenkumham dengan cara mendorong dan mempermudah pendaftaran merek melalui layanan digital. Layanan itu mampu meminimalisir potensi pungutan liar dan mempermudah akses masyarakat untuk mendaftarkan merek.

Selain itu, komitmen ease of doing bussiness juga ditunjukkan Kementerian Hukum dan HAM dengan investor asing dapat melakukan pra-investasi di Indonesia menggunakan visa kunjungan.

"Ini merupakan sebuah inovasi karena investor asing tersebut dalam menanamkan modalnya tanpa harus melalui berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang rumit," ungkap Ketua Bidang Hukum dan HAM,

kum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tugas dan fungsi dalam mewujudkan kepastian hukum, kata Yasonna, tercermin dalam kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai pihak dalam upaya bersama memperkuat pembentukan perundang-undangan, regulasi yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi penting dengan tetap memperhatikan tujuan hukum nasional yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

"Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus dilakukan secara lintas sektoral, ber-

sama-sama dan kolaborasi semua pihak," ucap Yasonna.

Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengajak seluruh peserta seminar, khususnya ASN di Kemenkumham untuk terus mengambil peran dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Peran kita, sekecil apapun, sangat berarti terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ruang gerak boleh saja dibatasi, namun jangan biarkan ruang berpikir kita disempitkan oleh situasi. Jadilah pribadi sehat jasmani dan rohani yang mampu berpikir kritis dan rasional, serta menjadi pribadi yang penuh welas asih untuk membantu sesama," pungkas Yasonna.

"Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus dilakukan secara lintas sektoral, bersama-sama dan kolaborasi semua pihak," ucap Yasonna.





LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAN BMN

"Peningkatan Kompetensi SDM Penyusun Laporan Keuangan dan BMN
Kemenkumham **Semakin PASTI**"



Rangkaian HDKD Tahun 2021, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Kemenkumham

Pelaksanaan Kegiatan Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 secara resmi digelar. Selasa (12/10/2021)



Iwan Santoso mengikuti jalannya acara pembukaan Kegiatan Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) melalui Zoom



Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Arya Dwi Jayanti turut mengikuti jalannya kegiatan secara virtual

Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso mengikuti jalannya acara pembukaan Kegiatan Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) melalui Zoom Cloud Meeting. Sedangkan Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara, Arya Dwi Jayanti bersama dengan jajarannya turut andil mengikuti jalannya Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Pelaporan Keuangan dan BMN.

Kegiatan yang dilaksanakan secara Live Streaming di Kanal Youtube Pusdatin Kumham ini dibuka dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, Anna Ernita yang menyampaikan Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 serta meningkatkan motivasi pejabat/penyusun laporan keuangan untuk senantiasa mengembangkan kompetensi/kapasitas diri. Anna berharap Kegiatan ini terselenggara dengan lancar,

sportif dan menghasilkan pemenang untuk setiap kategori dalam perlombaan ini.

Selanjutnya memberikan sambutan sekaligus membuka acara, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan bahwa dengan mengangkat tema Peningkatan Kompetensi SDM Penyusun Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semakin Pasti diharapkan dapat memberikan manfaat Peningkatan kapasitas diri dan menjadi sarana edukasi bagi seluruh penyusun Laporan Keuangan dan BMN serta kedepannya Laporan Keuangan yang dihasilkan berkualitas, transparan, dan sesuai dengan SAP.

Perlu diketahui rangkaian kegiatan Lomba Tingkat Manajerial dan Tingkat Pelaksana/penyusun ini rencana digelar hingga esok hari. Dimana pada hari ini memasuki Babak Penyisihan I, Babak Penyisihan II dan Verifikasi Peserta Babak Final dan untuk esok hari dilanjutkan dengan Babak Final dengan Penentuan juara 1,2, dan 3.

Kegiatan yang dilaksanakan secara Live Streaming di Kanal Youtube Pusdatin Kumham ini dibuka dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, Anna Ernita yang menyampaikan Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 serta meningkatkan motivasi pejabat/penyusun laporan keuangan untuk senantiasa mengembangkan kompetensi/kapasitas diri. Anna berharap Kegiatan ini terselenggara dengan lancar, sportif dan menghasilkan pemenang untuk setiap kategori dalam perlombaan ini.



Semarak HDKD 2021, Jajaran Kanwil Lampung Ikuti Seminar Nasional Oleh Wakil Presiden

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti pembukaan Seminar Nasional Oleh Wakil Presiden dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadika (HDKD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari ini, Selasa (12/10/2021)



Plt. Kakanwil beserta jajaran mengikuti jalannya seminar secara virtual



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan jika Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional arus dilakukan secara lintas sektoral

Seminar Nasional yang berjudul “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” ini berlangsung secara Virtual melalui Aplikasi Zoom dan diikuti oleh 899 Satuan Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja Unit Pusat, 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso hadir mengikuti pembukaan dan serangkaian acara Seminar Nasional dengan didampingi oleh Kepala Divisi Pemasayarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Imigrasi, Is Edy Eko-putranto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; dan Kepala Bagian Program & Humas, Basnamara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam Sambutannya menyampaikan, Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus dilakukan secara lintas sektoral, bersama-sama dan kolaborasi semua pihak. Menurutnya, Proses Check and Balance harus selalu dilakukan. Evaluasi terhadap ke-

bijakan Pemerintah dalam menanggulangi masalah ini diperlukan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seminar Nasional ini juga dihadiri secara daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional.

Dalam Keynote Speech yang disampaikan, Wakil Presiden meminta agar Kemenkumham dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang salah satu prioritasnya dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan dapat terus tumbuh dan berkembang dalam era kompetisi yang makin ketat.

Pada acara ini, turut hadir mendampingi Menteri Hukum dan HAM diantaranya Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI,

Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Penasehat Kehormatan Menteri. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber dan diakhiri dengan tanya-jawab dengan peserta Seminar Nasional.

“Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Melalui Hari Dharma Karya Dhika, semoga seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat terus menjaga semangat dalam mengabdikan dan berkarya untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia yang maju, adil, mandiri dan sejahtera”, ujar Wakil Presiden.



Kanwil Lampung Ikuti Pembukaan Skill & Challenge Menkumham Cup Peringatan HDKD 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti pembukaan skill & challenge Menkumham Cup Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI secara virtual melalui aplikasi zoom pada hari ini, Jumat (15/10/2021).

Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kepala Divisi Imigrasi, Is Edy Ekoputranto; dan Kepala Bagian Program dan Humas, Basnama-ra hadir bersama di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk mengikuti pembukaan skill & challenge tersebut secara virtual.

Lomba Skill and Challenge Menkumham Cup dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Lapangan Tembak Yasonna H.Laoly Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan diikuti seluruh satker Kemenkumham secara virtual. Dalam kesempatan ini, Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam mengikuti lomba. Kegiatan menembak ini merupakan ajang uji kemampuan, kapasitas, dan kompetensi bagi jajaran ASN

Kemenkumham, khususnya pada jajaran imigrasi dan pemasarakatan untuk melatih para personil dalam menjaga diri.

Serangkaian lomba Skill and Challenge Menkumham Cup ini akan dilaksanakan pada Sabtu (16/10) besok di Lapangan Tembak Marinir Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Ada dua kategori yang dilombakan, yakni Eksekutif Class 15 meter yang diperuntukkan bagi undangan VVIP dan Presisi Class 15 meter untuk perwakilan peserta dari masing-masing Unit Utama dan Kantor Wilayah. Peserta Skill and Challenge Menkumham Cup 2021 akan memperebutkan Juara 1, 2, dan 3 serta Juara Harapan 1, 2, dan 3 dari masing-masing kategori kelas pertandingan.



Plt. Kakanwil Pimpin Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bandar Lampung

Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karayadhika (HDKD) Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar ziarah dan upacara tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Bandar Lampung pada hari ini, Selasa (26/10/2021)



Iwan Santoso menabur bunga di pusara beberapa makam para pahlawan yang diikuti oleh para Pimti



Mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso selaku inspektur upacara



Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan dan doa kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dirangkaikan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso selaku inspektur upacara.

Dalam suasana khidmat, Iwan Santoso mengajak seluruh jajarannya untuk memberikan penghormatan dan merenungkan setiap perjuangan para pahlawan yang telah diberikan kepada bumi pertiwi demi perjuangan bangsa dan negara. Usai pelaksanaan upacara penghormatan, Plt. Ka-

kanwil Lampung didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama lainnya melakukan peletakan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah gugur.

Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara beberapa makam para pahlawan oleh Plt. Kakanwil Lampung diikuti seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan para Kepala UPT di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kegiatan yang dikoordinatori oleh

**“
Usai pelaksanaan upacara penghormatan, Plt. Kakanwil Lampung didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama lainnya melakukan peletakan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah gugur.
”**

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Yoga Kharisma Suhud berlangsung dengan tertib dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan



“Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, Kanwil Lampung Gelar Donor Darah dan Sumbangsi RSUD Abdul Moeloek Berikan New Normal Kit

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan beserta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas mengikuti kegiatan Bakti Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham secara virtual, Kamis (21/10).





Kantor Wilayah juga secara langsung mengirimkan New Normal Kit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek



Kegiatan donor darah dimana yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kegiatan ini secara simbolis mengundang 3 (tiga) orang perwakilan dari penerima empati Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia yang diakibatkan terpapar Covid-19. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham Tahun 2021.

Berpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan panitia kegiatan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto. Dilanjutkan de-

ngan penyerahan bantuan yang dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej bersama dengan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto kepada 5 (lima) keluarga ASN pada Unit Utama dan 19 Keluarga ASN Kemenkumham pada Kanwil yang meninggal karena Covid-19.

Turut andil dalam Rangkaian Kegiatan, Kantor Wilayah Lampung melaksanakan donor darah dimana para peserta donor berasal dari Lingkungan Kantor Wilayah Lampung beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Bandar Lampung sebanyak 64 orang.

“ Secara simbolis sebanyak 1000 paket New Normal Kit diserahkan kepada tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran. Budiman selaku Koordinator RSD Wisma Atlet menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kegiatan ini ditutup dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan donor darah oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. ”

Selanjutnya, pada Lapas Kelas IIA Metro: 19 orang pendonor, Lapas Kelas IIB Gunung Sugih: 24 orang pendonor, Rutan Kelas II Kotabumi: 31 orang, dengan total 138 orang pendonor. Kantor Wilayah juga secara langsung mengirimkan New Normal Kit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek sebagai salah satu Rumah Sakit yang menangani pasien yang terpapar Covid-19.



Puncak Peringatan HDKD, Kanwil Lampung Ikuti Upacara Secara Virtual

Berlangsung di AULA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta jajarannya mengikuti upacara peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke - 76 secara virtual melalui aplikasi zoom pada hari ini, Sabtu (30/10/2021). Upacara ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan peringatan HDKD yang telah diselenggarakan sebelumnya.





Penyerahan piagam penghargaan pada Pemenang lomba peringatan HDKD dan pegawai teladan Kanwil Lampung periode Oktober 2021

Upacara ini dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Kepala UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta seluruh pegawai Kanwil Lampung secara virtual di rumah masing-masing. Upacara yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ini juga diikuti seluruh kantor wilayah dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan luar negeri secara virtual.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang bertindak sebagai Inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa kedepannya, tanggal 19 Agustus akan ditetapkan sebagai sebagai Hari La-

hir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan ini dibacakan saat memimpin upacara Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada hari ini. Penetapan ini berdasarkan kajian, penelusuran sejarah, dan pengumpulan

bukti-bukti autentik, serta wawancara beberapa pakar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ke depan, Hari Dharma Karya Dhika akan diperingati pada tanggal 19 Agustus setiap tahunnya. Keputusan ini sekaligus mencabut Keputusan Men-





Upacara Peringatan HDKD diikuti seluruh kantor wilayah dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan luar negeri secara virtual

teri Kehakiman tahun 1985.

Menteri Hukum dan HAM RI juga menegaskan, bahwa jangan pernah puas dengan prestasi yang telah dicapai. Kemenkumham harus menjadi pioner dalam mendorong tercipta-

nya pemerintahan yang dinamis, bagaimana membuat birokrasi ini lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan serta



memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun untuk point yang paling penting disampaikan, yaitu ada enam. Pertama adalah perkuat Keimanan dan ketaqwaan.

“

Menteri Hukum dan HAM RI juga menegaskan, bahwa jangan pernah puas dengan prestasi yang telah dicapai. Kemenkumham harus menjadi pioner dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, bagaimana membuat birokrasi ini lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun untuk point yang paling penting disampaikan, yaitu ada enam. Pertama adalah perkuat Keimanan dan ketaqwaan.

”

Pada kesempatan ini, Kanwil Lampung juga turut menyerahkan piagam penghargaan pada Pemenang lomba peringatan HDKD dan pegawai teladan Kanwil Lampung periode Oktober 2021. Pelaksanaan Upacara HDKD ke-76 Tahun 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini di tutup dengan pemotongan tumpeng dan kue oleh Plt. Kakanwil Lampung, Iwan Santoso.



Jelang Desk Evaluasi TPN, Kanwil Lampung Lakukan Rapat Tim Pokja Pembangunan ZI Menuju WBK

Menjelang Desk Evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Rapat Internal Tim Program dan Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Selasa (12/10/2021)



Pt. Kakanwil, Iwan Santoso memberikan arahan dalam rapat Pokja

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso didampingi dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto dan Para Ketua Tim Pokja dan Sekretaris Pokja Pembangunan ZI Menuju WBK di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung membahas tentang Langkah-langkah persiapan untuk menghadapi desk evaluasi.

Memberikan tanggapan, Is Eko mengingatkan kepada seluruh tim pokja bahwa ada 3 (tiga) hal penting yang harus kita Kembali tanamkan kepada diri sendiri.

"Komitmen, Penguasaan Materi, dan

Internalisasi" tegas Is Eko

Dia berharap dengan bekal itu seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung dapat merubah pola pikir dan etika dalam bekerja sehingga penyandangan predikat WBK bisa diraih bersama di Kanwil Lampung.

Nur Ichwan yang juga menyampaikan pendapat meminta kepada seluruh tim pokja agar selalu memberikan internalisasi kepada jajarannya. Hal ini juga bertujuan bilamana di waktu yang tidak ketahui TPN melakukan inspeksi atau kunjungan dadakan, seluruh pegawai mampu dan sudah mengerti inovasi-inovasi apa saja yang telah dibangun oleh Kantor Wilayah Lampung.

Kegiatan te-
r u s
ber-

lanjut dengan kritik dan saran dari masing-masing Ketua Tim Pokja yang diharapkan kedepannya walaupun Kantor Wilayah Lampung belum dapat memastikan tentang penyandangan predikat WBK namun Pegawai di Lingkungan Kanwil Lampung telah berjati diri WBK maupun WBBM.

“

Iwan Santoso menyampaikan bahwa Pelaksanaan Survey Pembangunan ZI oleh MenpanRB, Desk Evaluasi yang membahas paparan dan penayangan video Tim Pokja, serta Kunjungan TPN dalam rangka penilaian sarana dan prasarana harus dapat dimaksimalkan demi terwujudnya keberhasilan dalam menyandang predikat WBK. Tak lupa, Iwan juga meminta kepada para pimpinan tinggi dan tim pokja dapat mengawal dan melakukan penguatan serta pendampingan kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Lampung yang lolos Panel Tim Penilai Internal (TPI) yang juga diajukan ke TPN di Tahun 2021.

”





Kanwil Lampung Berikan Internalisasi dan Penguatan Kepada PPNPN Terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung memasuki tahapan menjelang desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Rabu (13/10/2021)



Kepala Bagian Umum, Hadiyanto berikan penguatan terkait dengan pembangunan ZI WBK kepada PPNPN

Kepala Bagian Umum, Hadiyanto didampingi dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Yulinar Trisia dan Pelaksana melakukan internalisasi dan penguatan terkait dengan pembangunan ZI WBK kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Wilayah Lampung.

Hadiyanto meminta kepada seluruh PPNPN di Kanwil Lampung agar selalu meningkatkan kinerja dan selalu bertanggung jawab dengan tugas pokok masing-masing. Hadiyanto juga meminta agar selalu meningkatkan kedisiplinan waktu bekerja serta apabila menerima tamu terkait dengan pelayanan masyarakat harus santun dan ramah karena

sejatinya PPNPN juga merupakan bentuk citra di dalam Kantor Wilayah Lampung.

Selanjutnya, Yulinar Trisia mengharapkan kepada seluruh PPNPN agar selalu bersyukur dengan pekerjaan yang diemban sekarang serta bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga kerja ikhlas



Pemusnahan Arsip Fisik Fasilitatif dan Substantif di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

Dalam rangka mewujudkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran Lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Pemusnahan Arsip Fisik Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kamis (14/10/2021)



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan yang dalam hal ini mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan dalam sambutannya bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung berperan aktif dalam pembangunan tata Kelola pemerintahan yang bersih efektif, de-

mokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan dengan turu serta dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

"Kanwil Lampung telah melakukan Langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan GNSTA dengan step by step yang

diarahkan secara langsung oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal dan diharapkan segala yang telah diupayakan dapat berjalan dengan baik dan lancar” ujar Nur Ichwan.

Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum, Alkana Yudha yang mewakili Kepala Biro Sekjen Kemenkumham menyampaikan apresiasi atas penyusutan arsip dengan melaksanakan pemusnahan arsip substantif dan fasilitatif yang telah dilakukan Kantor Wilayah Lampung. Alkana Yudha mengharapkan kedepannya kegiatan penyusutan arsip ini bisa dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga Gudang arsip tetapi menjadi ruangan Arsiparis.

Selanjutnya, Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum, Alkana Yudha yang mewakili Kepala Biro Sekjen Kemenkumham menyampaikan apresiasi atas penyusutan arsip dengan melaksanakan pemusnahan arsip substantif dan fasilitatif yang telah dilakukan Kantor Wilayah Lampung. Alkana Yudha mengharapkan kedepannya kegiatan penyusutan arsip ini bisa dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga Gudang arsip tetapi menjadi ruangan Arsiparis.

Turut hadir secara langsung dari Jajaran Kantor Wilayah Lampung, Kepala

Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko-putranto, bersama dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Agung Prianto serta Pelaksana. Dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham hadir sebagai saksi yaitu Arsiparis Ahli Pertama, Radesta dan Pengolah Tata Naskah, Muhammad Hadiyan F, selanjutnya Kepala Subbagian Layanan dan Pertimbangan Hukum Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, R Hardiwinoto dan Arsiparis Pertama,

Lexty Rachmayani.

Selanjutnya, Pemusnahan Arsip Fisik Fasilitatif dan Substantif di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan secara simbolis. Perlu diketahui Kegiatan Pemusnahan Arsip ini dilaksanakan sesuai persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-KN.00.03/263/2021, Tanggal 10 September 2021, Hal: Persetujuan Pemusnahan Arsip dengan rincian daftar arsip musnah yaitu 14.000 berkas Lamaran CPNS Tahun 2017, 837 berkas Laporan Bulanan UPT Tahun 2014-2018, dan 72.625 Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Tahun 2001-2008.





DJKI Gandeng Kanwil Lampung Gelar Konsultasi Teknis Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik



Berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar konsultasi teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik pada hari ini, Kamis (14/10/2021).



Konsultasi teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik yang berlangsung di Hotel Emersia

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha terutama rumah bernyanyi, cafe, dan hotel, para seniman, serta LMKN dalam pelaksanaan pengelolaan royalti atas Hak Cipta Musik dan Lagu, sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mendaftarkan pencatatan hak ciptanya terutama musik dan lagu. Selain itu, melalui kegiatan konsultasi teknis ini juga diharapkan masing-masing pihak dapat saling bersinergi sehingga menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.

Hadir mewakili Ptt. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan yang pada sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Konsultasi Teknis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik, dalam rangka mewujudkan perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait mengenai Pengelolaan Royalti, Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Pada kesempatan ini, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin juga menyampaikan laporan sekaligus membuka secara resmi acara Konsultasi Teknis Pelaksanaan PP No. 56 Tentang Pengelolaan Royalti.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber yaitu Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Brigjen Yurod Saleh yang menyampaikan tentang tugas dan fungsi LMKN; Kepala Bidang Pe-

layanan Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, Ignatius Mangantar Tua yang menyampaikan tentang pelayanan hukum terkait hak cipta oleh Kanwil Lampung; General Manager Wahana Musik Indonesia (WAMI), Meidi Ferialdi yang menjelaskan teknis penarikan royalti; dan sebagai moderator yaitu Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK, Agung Damar-sangko.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha terutama rumah bernyanyi, cafe, dan hotel, para seniman, serta LMKN dalam pelaksanaan pengelolaan royalti atas Hak Cipta Musik dan Lagu, sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mendaftarkan pencatatan hak ciptanya terutama musik dan lagu. Selain itu, melalui kegiatan konsultasi teknis ini juga diharapkan masing-masing pihak dapat saling bersinergi sehingga menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.



Dialog Interaktif Pencegahan Pelanggaran KI, Kanwil Lampung Gandeng Korwas PPNS Polda

Bertempat di Radio Sonora, Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Lampung bersama dengan Kepolisian Daerah Lampung mengikuti Kegiatan Dialog Interaktif dengan materi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkumham dengan Kepolisian. Senin (18/10/2021)

Selaku Narasumber dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ignatius Tua MS memberikan beberapa penjelasan atas pertanyaan dari narasumber yang menyatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung telah mengadakan sosialisasi, seminar, bimtek mengenai KI sebagai bentuk pencegahan pelanggaran KI. Selain itu pemasangan Iklan, Poster, dan Baliho tentang ancaman pelanggaran KI juga telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung.

Ignatius menyampaikan upaya pencegahan pelanggaran KI dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu upaya Preventif dan Represif. Upaya Preventif adalah dengan melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Kekayaan Intelektual. Upaya Represif adalah upaya pencegahan dengan melakukan penanggulangan dengan cara penegakan hukum salah sa-

tunya melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Ignatius juga menjelaskan bahwa terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran KI, peranan Kanwil Kemenkumham Lampung memfasilitasi terhadap laporan atau pengaduan pelanggaran, selanjutnya upaya penyelesaian sengketa bisa melalui penyelesaian alternatif maupun secara hukum. Ignatius berharap para pemilik Kekayaan Intelektual dapat melaporkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung apabila terjadi pelanggaran KI dengan membawa bukti-bukti terkait adanya pelanggaran KI atau penyalahgunaan karya miliknya.

Selanjutnya, Narasumber dari Kepolisian Daerah Lampung, PS. Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Ditreskrimsus, Ipda Veri Efriyadi turut memberikan



Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ignatius Tua MS menyampaikan upaya pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual

Ignatius juga menjelaskan bahwa terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran KI, peranan Kanwil Kemenkumham Lampung memfasilitasi terhadap laporan atau pengaduan pelanggaran, selanjutnya upaya penyelesaian sengketa bisa melalui penyelesaian alternatif maupun secara hukum. Ignatius berharap para pemilik Kekayaan Intelektual dapat melaporkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung apabila terjadi pelanggaran KI dengan membawa bukti-bukti terkait adanya pelanggaran KI atau penyalahgunaan karya miliknya.

jawaban-jawaban dari moderator. Ipda Veri menyampaikan peran Koordinator Pengawas dalam mendampingi penegakan hukum sifatnya sama dengan PPNS, dimana koordinasi sangat penting dilakukan dalam menangani suatu perkara yang ditangi oleh PPNS Kemenkumham tersebut dengan memberikan bantuan antara lain Bantuan taktis (pers, peralatan), Bantuan teknis (laboratorium forensic dan identifikasi), dan Bantuan upaya paksa dan konsultasi.

Ipda Veri menjelaskan jabatan penyidik PPNS telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Bab I ketentuan Umum KUHAP, sedangkan untuk persyaratan untuk menjadi seorang PPNS sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 dirubah dengan PP no 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 berbunyi, penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Ipda Veri menyampaikan tentang kewenangan PPNS Kemenkumham menurut

UU serta menjelaskan bahwa Penyidik Kemenkumham bisa melakukan penahanan sesuai Perkap 6 Tahun 2010 tentang penyidikan PPNS tetapi dalam hal melakukan penahanan Penyidik Kemenkumham harus meminta bantuan kepada Penyidik Polri, dengan melalui proses gelar perkara internal dengan terpenuhinya alat bukti minimal 2 (dua) dan barang bukti didukung oleh keterangan ahli.

Menutup dialog, Ipda Veri berpesan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penyidik yang melayani bukan untuk dilayani oleh masyarakat, hindari ego sektoral dalam penanganan setiap perkara, dan Tingkatkan koordinasi kepada semua stakeholder terkait guna meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum.



Kanwil Lampung Kunjungi Pemda Pesisir Barat dan Lampung Barat Terkait Harmonisasi Raperda dan Raperbup

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Perancang Peraturan Perundang-Undangan melakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat pada Senin (18/10/2021). Hal ini merupakan salah satu bentuk keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, salah satunya yaitu harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.



Rugun Tresia Oktaviani, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung memimpin Tim Harmonisasi Raperda di Kabupaten Lampung Barat



Tim Harmonisasi di Kabupaten Pesisir Barat dipimpin oleh Kasubbid FPPHD Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Masriakromi.

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diharmonisasikan terdiri dari 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan 4 Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui;
- c. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Pemilihan Peratin;
- d. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Teknis Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
- e. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- f. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.

Tim Harmonisasi di Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Kabid Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Rugun Tresia Oktaviani Pakpahan dan perancang peraturan perundang-undangan zonasi Lampung Barat yaitu Dinas Ismela Yunita, Muhammad Yudoraharjo, dan M. Ridho Pratama Putra sedangkan tim harmonisasi di Kabupaten Pesisir Barat dipimpin oleh Kasubbid FPPHD Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Masriakromi. serta perancang peraturan perundang-undangan zonasi Pesisir Barat yaitu Deni Saputra, Wahyu

Sutanto, dan Elydawati. Tim Harmonisasi di Kabupaten Pesisir Barat diterima langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Audi Marpi yang sekaligus memimpin jalannya rapat harmonisasi tersebut.

Peraturan Daerah harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun yang sejajar dan dalam teknik penulisannya harus sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya harmonisasi peraturan daerah ini, diharapkan seluruh produk hukum yang telah diharmonisasikan dapat diterima dan dijalankan dengan baik di tengah-tengah masyarakat serta selaras dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.



“Back to Basics”, Kadivpas Bina Mental, Disiplin, dan Integritas Petugas Pemasyarakatan Lapas/Rutan

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (*Back to Basics*) sesuai yang diarahkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Senin (18/10/2021)

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Endang Lintang dan Tim Psikologi Kanwil Kemenkumham Lampung, Resty Pramitha Dewi memberikan materi penguatan yang terkait dengan petugas pemasyarakatan.

Kegiatan ini merupakan Langkah strategi dengan pedoman kepada seluruh jajaran pemasyarakatan guna mewujudkan kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Program Back to Basics adalah strategi peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan berdasarkan prinsip dasar pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini meliputi dengan Pelayanan tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan klien, Keamanan

dan ketertiban, Perawatan Kesehatan, dan Pengelolaan Basan dan baran.

“ Farid Junaedi juga memberikan arahan-arahan serta penguatan kepada petugas pemasyarakatan bahwa dalam melaksanakan kinerja di lapangan, petugas pemasyarakatan harus mampu memahami secara tepat kondisi di lapangan. Hal itu guna untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas maupun rutan. **”**



Reses ke Kanwil Lampung, Taufik Basari Bahas Overcrowding Lapas Hingga Layanan OBH

Dalam rangka Kunjungan Kerja Perorangan ("Reses") Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi III, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Jum'at (22/10/2021)



Taufik Basari memberikan apresiasi atas kinerja dari Kanwil Kemenkumham Lampung, khususnya Lapas dan Rutan dikarenakan telah mampu melewati masa pandemi Covid-19.

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso didampingi dengan Kepala Divisi Pemasarakan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan beserta dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menyambut kedatangan Taufik Basari beserta dengan rombongan.

Dalam sambutannya, Iwan Santoso menyampaikan dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19, beberapa langkah strategis telah dilakukannya

“ Iwan Santoso juga menjelaskan upaya-upaya peningkatan layanan adalah dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Hingga saat ini sedang mengusulkan kenaikan tingkat/kelas sebanyak 2 (dua) UPT yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dan Balai Pemasarakan Kelas II Bandar Lampung, hal ini bertujuan juga untuk pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal dan optimal. ”

Kesehatan Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. Selanjutnya melaksanakan program “Kumham Peduli Kumham Berbagi” telah membagikan paket sembako dan juga new normal kit.

Iwan Santoso juga menjelaskan upaya-upaya peningkatan layanan adalah dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Hingga saat ini sedang mengusulkan kenaikan tingkat/kelas sebanyak 2 (dua) UPT yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dan Balai Pemasarakan Kelas II Bandar

itu penanggulangan dengan pemberlakuan isolasi mandiri dan pemantauan bagi Warga Binaan, berkoordinasi dengan dinas Kesehatan sehingga dapat diambil Langkah-langkah jika keadaan memburuk. Selanjutnya dalam Langkah pencegahan dengan

mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi kepada para Pegawai maupun Warga Binaan, yang tercatat sebanyak 92% pegawai telah divaksinasi dan 68,5% WBP telah divaksinasi dengan bekerjasama dengan Dinas





Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengungkapkan terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH) agar ditingkatkan layanan penyuluhan hukum terhadap masyarakat

Lampung, hal ini berujuan juga untuk pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal dan optimal.

Menanggapi penjelasan, Taufik Basari memberikan apresiasi atas kinerja dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, khususnya Lapas dan Rutan dikarenakan telah mampu melewati masa pandemi Covid-19. Taufik Basari membahas beberapa hal mulai dari Overcrowding Pemasyarakatan, permasalahan HAM, hing-

ga Layanan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Mencari solusi dalam overcrowding (penghuni lapas melebihi kapasitas dimiliki oleh Lapas) persoalan klasik yang terjadi selama ini.

Selain itu Tobas menghimbau untuk permasalahan HAM yang ada, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk dapat bekerjasama dengan DPRD Provinsi Lampung. Untuk Organisasi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung diharapkan dapat lebih maksimal mendorong terhadap Pendidikan dan penyuluhan hukum, serta masyarakat di Kabupaten dan Kota yang kurang mampu harus dapat terbantu dalam masalah-masalah dibidang hukum.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengungkapkan terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH) agar ditingkatkan layanan penyuluhan hukum terhadap masyarakat hingga ke Kabupaten/Kota serta kedepannya diharapkan OBH lebih banyak lagi termasuk dengan bantuan hukum terhadap Warga Binaan pemasya-

rakatan.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi, Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Endang Lintang yang menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Endang berharap dalam penyusunan RUU KUHP agar memasukan pasal yang terkait dengan perlindungan terhadap Petugas Pemasyarakatan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan juga menyampaikan tentang beberapa titik permasalahan HAM di Provinsi Lampung serta masih terdapat beberapa OBH yang sedang didaftarkan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pemberian cinderamata antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Taufik Basari selaku Anggota DPR Republik Indonesia Komisi III serta ditutup dengan sesi foto bersama.

"Ketika Overcrowding pastinya pembinaan masyarakat tidak akan optimal. Oleh karena itu kami akan mencoba mencari solusi (jalan keluarnya) terkait hal tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Ditjen Pemasyarakatan atau Kanwil Kemenkumham,"ucap pria yang akrab dipanggil Tobas.



Yasonna Serahkan Sembilan Kekayaan Intelektual ke Korpolaairud Polri

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan sembilan Kekayaan Intelektual (KI) kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolaairud Baharkam Polri), Verdianto I. Bitticaca di Markas Komando Korpolaairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Selasa (26/10/2021).

"Semoga melalui pelaksanaan acara ini, dapat terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antar instansi, baik di lingkungan Kemenkumham maupun dengan Polri, khususnya Korpolaairud Baharkam Polri," kata Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa jumlah tingkat pendaftar-

an KI akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

"Karena kekayaan intelektual, baik hak cipta, desain industri, merek, paten, tentunya menghasilkan suatu kreatifitas inovasi dan temuan-temuan baru yang cang-gih," ucap Menkumham.

Dengan semakin banyaknya KI yang diberikan kepada Polri, khususnya Korpolaairud, menunjukkan adanya peningkatan dan kemajuan kesadaran akan hak cipta yang terjadi di tubuh Korpolaairud. Yasonna yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh lapisan masyarakat serta aparaturnegara untuk peduli dan sadar akan pentingnya melindungi KI.

"Kita juga harus menjaga dan menyosialisasikan, serta mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya," tutur Yasonna. Adapun sembilan KI yang diberikan Menkumham

ke Kepala Korpolaairud Baharkam Polri, antara lain Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pataka dan Lambang Kesatuan Korpolaairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Brevet dan Wing Korpolaairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Kendaraan Dinas Korpolaairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Desain Gapura Markas Kesatuan.

Kemudian, Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Pakaian Dinas Korpolaairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Booklet Sarana dan Alat Utama Korpolaairud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Mars Airud; Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Hymne Airud; dan Surat Perlindungan Pencatatan Ciptaan Lagu Pengantar Pin-dah Tugas.

Bagi Korpolaairud sendiri, pemberian KI ini merupakan bentuk kolaborasi dan dukunganKemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara.



Kunker Ke Rutan Sukadana dan Lapas Gunsu, Plt. Kakanwil Saksikan Hibah Ambulance dari Bupati Lampung Timur

Kunjungan Kerja Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso menuju Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sukadana. Rabu (27/10/2021) Dalam rangka Penyerahan Mobil Dinas dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pengajian Akbar (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H/2021M) bertemakan "Mene-ladani Akhlak dan Meningkatkan Cinta Kepada Rosululloh SAW".

Jumadi selaku Kepala Rutan Klas IIB Sukadana menyambut kedatangan dari para tamu yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Jumadi yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah yang berkenan hadir dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Timur, Dawan Rahardjo yang telah menghibahkan 1(satu) buah mobil ambulance kepada Rutan Klas IIB Sukadana.

Selanjutnya, Dawan Rahardjo memberikan sambutan yang menyampaikan bahwa mobil

ambulance yang dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada Rutan Sukadana diharapkan mampu memberikan manfaat terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti ini. Dawan juga memberikan apresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh Kepala Rutan Sukadana dan jajaran yang telah membentuk blok santri pada Rutan Sukadana. Dawan berharap dengan adanya pembinaan rohani yang diberikan oleh Rutan Sukadana, Warga Binaan dapat merubah akhlak dan perilaku. Kedepannya dawan akan berusaha memberikan bantuan kepada Warga Binaan Rutan Sukadana dengan memberikan pelatihan keterampilan atau skill.

“

Iwan berharap bantuan ini dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat khususnya warga binaan di Rutan SUkadana. Iwan berapresiasi atas sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta para FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Timur dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Rutan Klas IIB Sukadana.

”

Acara berlanjut dengan serah terima dan penandatanganan hibah 1 (satu) buah mobil ambulance antara Kepala Rutan Sukadana dengan Bupati Lampung Timur dan disaksikan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah. Dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari Iwan Santoso, “Di tengah masa pandemi Covid-19, alat transportasi Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan vital yang dibutuhkan” ujar Iwan

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lampung Timur atas pemberian bantuan kendaraan dinas, berupa 1 (satu) unit mobil ambulans kepada Rutan Kelas IIB Sukadana” ucap Iwan

Iwan berharap bantuan ini dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat khususnya warga binaan di Rutan SUkadana. Iwan berapresiasi atas sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta para FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Timur dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Rutan Klas IIB Sukadana.

Sebelum meninggalkan kegiatan, Iwan Santoso juga meres-



Dawan Rahardjo menyampaikan bahwa mobil ambulance yang dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada Rutan Sukadana diharapkan mampu memberikan manfaat terutama pada masa pandemi Covid-19

mikan Patung Gajah yang dibuat sebagai icon Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sukadana.

Berlanjut pada Kunjungan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Denial Arif selaku Kalapas Gunung Sugih menyambut kedatangan Plt. Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan beserta jajaran. Iwan Santoso langsung menuju Blok Hunian Warga Binaan Pemasarakatan Wanita, yang memberikan nasehat kepada beberapa Binaan Wanita.

“Sekelam apapun masa lalumu jangan menjadi penentu untuk masa depanmu” Tegass Iwan

Kegiatan dilanjutkan dengan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 yang disaksikan langsung Oleh Iwan Santoso. Menutup kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Iwan Santoso juga meresmikan operasional 1 (satu) buah unit mobil Transpas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk keperluan di Lapas Gunung Sugih.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

PENYULUHAN HUKUM TERPADU

“OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DEMI TERWUJUDNYA
AKSES HUKUM DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN”

Bandar Lampung, 29 Oktober 2021



Kanwil Lampung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu 2021

Berlangsung di Aula, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar Penyuluhan Hukum Terpadu pada hari ini, Jumat (29/10/2021). Penyuluhan Hukum Terpadu dengan tema “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Akses Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat Miskin” ini diikuti oleh 30 orang pegawai yang berasal dari Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Narkotika Bandar Lampung, Rumah Tahanan Bandar Lampung, Lapas Perempuan Bandar Lampung, dan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung



Narasumber Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi menyampaikan terkait akses keadilan bagi masyarakat miskin



Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP dan dilanjutkan dengan sambutan serta pembukaan acara oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso. Turut hadir Kepala Divisi Pemasayarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Imigrasi, Is Eko Edyputranto; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan. Penyuluhan hukum terpadu ini menghadirkan 3 (Tiga) Narasumber yaitu Penyuluh Hukum Madya Kanwil Lampung, Nurka Lingga Murti; Ketua LBH Sejahtera Bersama Lampung, Masayu Robianti; dan secara virtual yaitu Anggota

DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi.

Penyuluh Hukum Madya dalam pemaparannya menyampaikan mengenai bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan upaya negara untuk memenuhi akses hukum bagi masyarakat. Beliau juga menyampaikan pentingnya sinergi antara OBH dan UPT (Lapas, Bapas, Rutan) untuk mempermudah pengawasan oleh Panitia Pengawas Daerah. Mengingat dalam kegiatan Pengawasan Daerah sebelumnya terjadi kendala karena kurangnya

Dengan adanya Penyuluhan Hukum Terpadu ini, diharapkan pegawai di seluruh UPT di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

sinergisitas antar lembaga tersebut;

Sebagai penyelenggara bantuan hukum, Ketua OBH Sejahtera Bersama Lampung menjelaskan pentingnya pendampingan hukum bagi mereka yang didakwa pasal dengan ancaman pidana penjara diatas 5 tahun. Apabila hal tersebut terjadi pada masyarakat miskin, disinilah peran penting OBH agar hak-hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan persamaan kedudukan di depan hukum terpenuhi. Beliau juga menyampaikan bahwa OBH harus teliti agar anggaran bantuan hukum tetap sasaran yakni masyarakat miskin, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang;

Anggota DPRD Provinsi Lampung menyampaikan terkait akses keadilan bagi masyarakat miskin. Beliau berpendapat bahwa keberadaan bantuan hukum sangat penting bagi masyarakat. Karenanya beliau menghimbau agar penyerapan anggaran bantuan hukum oleh OBH dapat dimaksimalkan disamping juga tetap memerhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat miskin.

rangkaian kegiatan HDKD 2021



1

2

3

4

1 OKTOBER 2021

1 OKTOBER 2021

1-12 OKTOBER 2021

4 OKTOBER 2021

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Doa Kemenkumham untuk Negeri

Lomba Film Inovasi Pelayanan Publik dan Konten Kreatif

Lokakarya Perencanaan Zona Intermuka Menuju WBK



8

9

10

11

18 OKTOBER 2021

21 OKTOBER 2021

23 OKTOBER 2021

23-24 OKTOBER 2021

Lomba PUBG Online

Kumham Peduli Kumham Berbagi

Empati Kumham bagi Keluarga ASN yang meninggal dunia karena Covid 19

Silaturahmi





5



6



7

OKTOBER 2021

12 OKTOBER 2021

12-13 OKTOBER 2021

15-16 OKTOBER 2021

Peringatan Hari Sesi
K/BBM

Seminar Nasional
Peran Kemenkumham dalam
mengakselerasi Indonesia
Sehat dan Pemulihan Ekonomi

Lomba Cerdas Cermat
Akuntansi dan BMN

Menkumham Cup
Skill and Challenge



12



13



14

OKTOBER 2021

25-26 OKTOBER 2021

26 OKTOBER 2021

30 OKTOBER 2021

Peringatan Hari Sesi

Pelayanan Publik
"Legal Expo"

Tabur Bunga TMP Kedaton
Bandar Lampung

Upacara HDKD 2021





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

mengucapkan selamat

HUT KE-76 KEMENKUMHAM

DHARMA KARYADHIKA

HDKD 2021



**Semakin
PASTI**





7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

AYO LAWAN COVID -19



IWAN SANTOSO

Pit. KAKANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



Mencuci
Tangan



Memakai
Masker



Menjaga
Jarak



Menjauhi
Kerumunan



Mengurangi
Mobilitas



Menghindari
makan bersama

**TERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN**

6M!